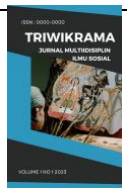
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TALUH GORENG, *ADE HASIL*: ANTARA BUDAYA KEPATUHAN, LEGITIMASI KEKUASAAN, DAN DEGRADASI PARTISIPASI KRITIS MASYARAKAT BALI

Elsa Agrevina[1], Niken Vintang Erdiwiyana[2]

[1] Master of Public Administration, Universitas Padjadjaran

[2] Master of Business Administration, Institut Teknologi Bandung

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

elsa23004@mail.unpad.ac.id,
nikenvntge@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Artikel ini mengkaji hubungan antara keharmonisan sosial, kepatuhan, dan partisipasi politik masyarakat Bali dalam kehidupan demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah bagaimana nilai keharmonisan sosial dapat berhadapan dengan kebebasan menyampaikan kritik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa demonstrasi, khususnya yang dilakukan mahasiswa, kerap dinilai berdasarkan hasil langsung yang dicapai, sehingga makna partisipasinya sebagai bentuk pengawasan publik berisiko diabaikan. Melalui metafora "Taluh Goreng, Ade Hasil", artikel ini mengkritisi cara pandang pragmatis terhadap perjuangan serta menegaskan bahwa keharmonisan sosial seharusnya tidak menjadi alasan untuk membungkam suara kritis masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi; Keharmonisan Sosial; Partisipasi Politik; Kritik Publik

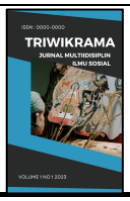
A B S T R A C T

This article examines the relationship between social harmony, compliance, and political participation among the Balinese in democratic life. Using a descriptive qualitative method based on a literature study, it explores how the value of social harmony can come into tension with the freedom to express criticism. The discussion shows that demonstrations, particularly those carried out by students, are often judged by the immediate results they achieve, so that their meaning as a form of public oversight risks being overlooked. Through the metaphor "Taluh Goreng, Ade Hasil," this article criticizes a pragmatic view of struggle and affirms that social harmony should not become a reason to silence critical voices.

***Keywords**: Democracy; Social Harmony; Political Participation; Public Criticism*

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan demokrasi, perjuangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tidak selalu berakhir pada perubahan kebijakan yang dapat dilihat secara langsung. Ada kalanya suara publik membutuhkan waktu panjang untuk memperoleh perhatian, bahkan tidak jarang justru berhadapan dengan respons yang meremehkan, penolakan, atau anggapan bahwa tindakan tersebut tidak akan membawa hasil apa pun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perjuangan sosial tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan mencapai tujuan, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat memandang proses, keberanian untuk bersuara, serta kesediaan untuk mempertahankan kepentingan bersama. Di tengah masyarakat yang semakin terbiasa menilai segala sesuatu berdasarkan hasil yang cepat dan terukur, perjuangan yang belum memperlihatkan



perubahan kerap dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Padahal, dalam demokrasi, menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan mengorganisasi tuntutan merupakan bagian penting dari proses pengawasan terhadap kekuasaan.

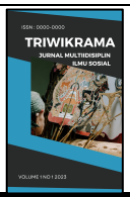
Fenomena tersebut menjadi menarik ketika ditempatkan dalam konteks masyarakat Bali. Bali selama ini dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat dengan nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan, solidaritas, serta penghormatan terhadap tatanan sosial dan adat. Nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Namun, dalam situasi tertentu, tuntutan untuk menjaga keharmonisan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ruang yang tersedia bagi perbedaan pendapat dan kritik. Apakah setiap bentuk kritik dapat diterima sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan sosial, atau justru berpotensi dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban dan keharmonisan? Pertanyaan ini penting karena keharmonisan sosial seharusnya tidak dimaknai sebagai keadaan tanpa perbedaan atau konflik, melainkan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara terbuka dan adil.

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi di Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 88,73. Capaian tersebut menunjukkan kondisi demokrasi Bali yang relatif tinggi. Jika dilihat berdasarkan aspek pembentuknya, aspek kebebasan memperoleh skor 93,54, aspek kesetaraan sebesar 86,38, dan kapasitas lembaga demokrasi sebesar 86,80. Meskipun angka tersebut memberikan gambaran positif, capaian indeks secara keseluruhan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan demokrasi telah berjalan secara optimal. Sejumlah indikator justru memperlihatkan adanya persoalan yang masih perlu diperhatikan. Pada tahun yang sama, akses masyarakat terhadap informasi publik memperoleh skor 64,14, sedangkan kinerja lembaga legislatif memperoleh skor 60,55. Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi dan kualitas representasi politik masih menjadi bagian yang perlu diperkuat dalam kehidupan demokrasi di Bali (BPS Provinsi Bali, 2026a, 2026b).

Temuan tersebut menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan penjelasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam *Policy Brief* mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung capaian Indeks Demokrasi Indonesia. Dokumen yang diterbitkan pada 8 Mei 2026 tersebut mengidentifikasi bahwa tantangan demokrasi di Bali tidak hanya berkaitan dengan kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitas keterlibatan masyarakat. Salah satu persoalan yang disoroti adalah partisipasi masyarakat yang masih bersifat prosedural, disertai tantangan literasi politik digital dan belum optimalnya pendidikan politik yang inklusif. Dengan demikian, tingginya capaian indeks demokrasi perlu dibaca secara lebih kritis karena keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi belum tentu selalu mencerminkan keterlibatan yang substantif dalam memengaruhi kebijakan publik (Badan Kesbangpol Provinsi Bali, 2026).

Di sisi lain, ruang penyampaian aspirasi masyarakat Bali dapat dilihat melalui berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan keberadaan kritik publik adalah aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 di Denpasar. Berdasarkan pemberitaan Bali Post, ribuan orang mendatangi Mapolda Bali untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi nasional, termasuk tuntutan pencabutan tunjangan DPR, penolakan kenaikan pajak, penolakan kekerasan aparat, serta pembebasan demonstran yang ditahan (Balipost, 2025a). Aksi tersebut juga berkaitan dengan persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat lokal. Dalam pernyataan sikap bersama Forum Warga Setara (ForWaras)

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



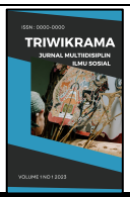
pada 2 September 2025, sejumlah persoalan Bali yang disoroti meliputi kenaikan pajak daerah di Badung, pengelolaan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan pertanian, serta persoalan upah dan tingginya biaya hidup (Balipost, 2025b). Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa kritik masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai reaksi terhadap situasi politik nasional, tetapi juga merupakan bentuk respons terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, keberadaan aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi tidak selalu diikuti oleh penerimaan yang sama dari seluruh kelompok masyarakat. Dalam ruang publik, perjuangan sering kali dinilai berdasarkan hasil yang segera terlihat. Ketika sebuah aksi tidak langsung menghasilkan perubahan kebijakan, muncul anggapan bahwa tindakan tersebut tidak memberikan manfaat. Bahkan, perhatian publik dapat bergeser dari substansi tuntutan menuju penilaian terhadap cara masyarakat menyampaikan kritik. Situasi ini menimbulkan persoalan tersendiri bagi kehidupan demokrasi: masyarakat diharapkan berpartisipasi, tetapi ketika partisipasi diwujudkan melalui kritik atau aksi protes, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu. Akibatnya, terdapat kemungkinan terbentuknya jarak antara partisipasi yang secara normatif didorong dalam demokrasi dan penerimaan sosial terhadap praktik penyampaian aspirasi.

Dalam konteks inilah ungkapan "*Taluh Goreng, Ade Hasil*" digunakan sebagai metafora untuk membaca kecenderungan masyarakat dalam menilai perjuangan berdasarkan hasil yang dapat segera dirasakan. Ungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan bagaimana sebuah perjuangan dipersepsikan ketika hasilnya belum terlihat, bagaimana kritik dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak produktif, serta bagaimana sikap patuh dan keinginan menjaga keharmonisan dapat berhadapan dengan kebutuhan untuk menyuarakan ketidakadilan. Persoalannya bukan terletak pada nilai kebersamaan atau keharmonisan yang hidup dalam masyarakat Bali, melainkan pada kemungkinan ketika nilai-nilai tersebut ditafsirkan secara sempit sehingga ruang kritik menjadi terbatas. Kepatuhan terhadap tatanan sosial tidak seharusnya menghilangkan hak masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan, sementara keberanian menyampaikan kritik tidak semestinya langsung dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap keharmonisan.

Kajian mengenai persoalan ini penting karena demokrasi tidak cukup diukur melalui keberadaan pemilihan umum, tingginya indeks demokrasi, ataupun jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan politik. Demokrasi juga memerlukan ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan ketidaksetujuan, memperoleh informasi, mengawasi pemerintah, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa rasa takut terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai budaya kepatuhan, keharmonisan sosial, dan keberanian menyampaikan kritik perlu ditempatkan sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi lokal. Tulisan ini bertujuan mengkaji hubungan antara nilai keharmonisan sosial, kecenderungan kepatuhan, dan praktik penyampaian aspirasi masyarakat di Bali, sekaligus mempertanyakan bagaimana perjuangan sosial kerap dinilai berdasarkan hasil yang tampak dalam waktu singkat. Melalui pembacaan kritis terhadap data demokrasi, peristiwa demonstrasi, dan wacana sosial yang berkembang, tulisan ini berupaya menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak kehilangan maknanya hanya karena perubahan belum segera terwujud. Sebab, dalam kehidupan demokrasi, keberanian untuk bersuara merupakan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap dapat dipertanyakan dan kepentingan publik tidak diabaikan.

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena sosial dan politik yang berkaitan dengan partisipasi demokrasi, budaya kepatuhan, serta penerimaan masyarakat terhadap penyampaian kritik di Bali. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian berupaya menguraikan dan menginterpretasikan fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang relevan. Bahan kajian meliputi publikasi statistik Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, pemberitaan media massa, serta publikasi organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan kondisi demokrasi dan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di Bali. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji sekaligus membandingkan informasi dari sumber pemerintah, media, dan masyarakat sipil.

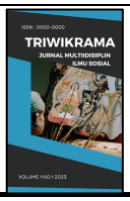
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengumpulkan dokumen serta publikasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan informasi ke dalam empat tema utama, yaitu:

- Capaian dan kualitas partisipasi demokrasi di Bali
- Cara pandang pragmatis masyarakat terhadap perjuangan dan perubahan sosial
- Hubungan antara nilai keharmonisan sosial, budaya kepatuhan, dan penerimaan terhadap kritik
- Demonstrasi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik non-elektoral.

Selanjutnya, informasi dari berbagai sumber diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan empiris dan konsep-konsep yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara budaya sosial dan praktik demokrasi. Analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan konteks, kredibilitas, serta keterbatasan masing-masing sumber. Dengan demikian, data statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demokrasi, sedangkan dokumen kebijakan, laporan penelitian, pemberitaan, dan publikasi masyarakat sipil digunakan untuk memahami dinamika partisipasi serta penyampaian aspirasi publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum dilengkapi dengan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung kepada masyarakat Bali. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kecenderungan kepatuhan, penerimaan terhadap kritik, dan cara pandang pragmatis terhadap perjuangan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas sikap seluruh masyarakat Bali. Hal-hal tersebut diposisikan sebagai proposisi analitis yang dibangun berdasarkan penelaahan literatur dan dokumen, sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Sosial dan Budaya Menghindari Konflik: Ketika Keharmonisan Berhadapan dengan Kritik

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat Bali adalah bagaimana nilai keharmonisan dapat memengaruhi cara seseorang menyampaikan pendapat dan merespons perbedaan. Kehidupan masyarakat Bali memiliki keterikatan yang kuat dengan komunitas adat, hubungan kekerabatan, serta berbagai bentuk ikatan sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga solidaritas dan keberlangsungan kehidupan bersama. Akan tetapi, dalam hubungan sosial yang memiliki struktur dan hierarki tertentu, seseorang tidak selalu memiliki kebebasan yang sama untuk menyampaikan ketidaksetujuan, terutama apabila kritik tersebut berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau politik lebih kuat.

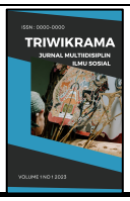
Kecenderungan menghindari konflik terbuka dapat muncul bukan semata-mata karena masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap persoalan publik, melainkan karena adanya pertimbangan mengenai konsekuensi sosial setelah kritik disampaikan. Dalam komunitas yang hubungan antarwarganya berlangsung dekat, perbedaan pendapat dapat berpotensi memengaruhi hubungan kekerabatan, kedekatan dengan tokoh masyarakat, maupun posisi seseorang di lingkungan sosialnya. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, misalnya, dapat dianggap sebagai persoalan politik yang seharusnya tidak dibawa ke dalam hubungan sosial. Akibatnya, sebagian orang mungkin memilih diam, bukan karena sepenuhnya menyetujui kebijakan tersebut, melainkan karena menganggap menjaga hubungan sosial lebih aman daripada terlibat dalam perdebatan terbuka.

Fenomena ini perlu dibaca secara hati-hati agar tidak terjebak pada anggapan bahwa masyarakat Bali secara alami memiliki karakter yang patuh atau tidak kritis. Kepatuhan bukanlah sifat bawaan suatu kelompok masyarakat, melainkan dapat terbentuk melalui pengalaman sosial, relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan norma yang berkembang dalam lingkungan tertentu. Dalam konteks ini, nilai keharmonisan dapat mengalami pergeseran makna ketika digunakan untuk membatasi kritik. Keharmonisan yang semula bertujuan menjaga hubungan sosial justru berpotensi menjadi alasan untuk menghindari pembicaraan mengenai persoalan yang tidak nyaman.

Kajian I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, Kacung Marijan, dan I.B. Wirawan (2022) mengenai aristokrasi politik lokal di Bali menunjukkan bahwa dinamika politik Bali pascareformasi masih dipengaruhi oleh budaya politik elitis dan relasi patron-klien. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antara patron dan masyarakat dapat terbentuk melalui keterkaitan sosial, ekonomi, agama, dan politik. Temuan ini memberikan perspektif bahwa relasi masyarakat dengan pemegang pengaruh tidak selalu berlangsung dalam hubungan yang setara. Dalam kondisi tertentu, kedekatan dengan figur yang memiliki sumber daya atau pengaruh dapat menciptakan ketergantungan, sehingga masyarakat memiliki pertimbangan lebih besar ketika hendak menyampaikan kritik terhadap pihak tersebut (Pinatih et al., 2022).

Dengan demikian, persoalan kepatuhan masyarakat tidak cukup dijelaskan melalui nilai budaya semata. Perlu diperhatikan pula bagaimana struktur sosial dan relasi kekuasaan bekerja

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com



dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang merasa bahwa kritik dapat mengganggu hubungan sosial, mengurangi akses terhadap bantuan, atau menimbulkan ketegangan dengan pihak yang memiliki pengaruh, sikap diam dapat menjadi pilihan yang dianggap paling aman. Di sinilah keharmonisan perlu dibedakan dari kepatuhan tanpa ruang kritik. Masyarakat yang harmonis bukanlah masyarakat yang selalu menyetujui keputusan pemimpinnya, melainkan masyarakat yang mampu mempertahankan hubungan sosial sekaligus memberikan ruang bagi perbedaan pendapat.

Mahasiswa Turun ke Jalan: Mengapa Perjuangan Justru Diremehkan?

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik non-elektoral yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di luar mekanisme pemilihan umum. Kehadiran mahasiswa dalam aksi demonstrasi memiliki posisi penting karena mahasiswa sering kali mengambil peran sebagai kelompok yang menyuarakan persoalan publik, mengkritisi kebijakan, dan mengingatkan pemerintah terhadap tanggung jawabnya. Namun, dalam praktiknya, aksi mahasiswa tidak selalu memperoleh penerimaan positif. Tidak sedikit kritik yang justru diarahkan kepada demonstran, mulai dari anggapan bahwa mahasiswa hanya mencari perhatian, tidak memahami persoalan pemerintahan, hingga tuduhan bahwa aksi demonstrasi tidak akan menghasilkan perubahan.

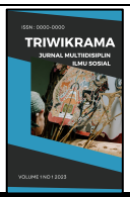
Cara pandang tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam memahami partisipasi demokrasi. Demonstrasi sering kali dinilai berdasarkan hasil langsung yang berhasil dicapai, bukan berdasarkan fungsi demokratis yang dijalankannya. Ketika mahasiswa turun ke jalan tetapi kebijakan tidak segera berubah, perjuangan tersebut dianggap gagal. Padahal, demonstrasi tidak selalu bertujuan menghasilkan keputusan dalam satu hari. Aksi publik dapat berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran, memperluas informasi, mengumpulkan dukungan masyarakat, dan memberikan tekanan politik agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan yang dipersoalkan.

Dalam konteks Bali, aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 memperlihatkan bahwa persoalan yang disuarakan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan isu politik nasional, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah. Forum Warga Setara (ForWaras), melalui pernyataan sikap pada 2 September 2025, mencatat sejumlah persoalan yang disuarakan dalam aksi tersebut, antara lain kenaikan tarif pajak daerah di Kabupaten Badung, pengelolaan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan pariwisata, serta persoalan upah dan biaya hidup. ForWaras juga menyoroti pernyataan sejumlah pejabat publik yang dinilai berpotensi membelah solidaritas masyarakat dan memberikan stigma terhadap demonstran (Balipost, 2025b).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak dapat begitu saja dipisahkan dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ketika mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya menyampaikan tuntutan mengenai pajak, lingkungan, ruang hidup, dan kesejahteraan, mereka sedang membawa persoalan yang memiliki dampak terhadap kehidupan publik. Oleh karena itu, meremehkan aksi demonstrasi hanya karena tidak menghasilkan perubahan secara instan berpotensi mengabaikan substansi persoalan yang sedang disampaikan.

Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah kecenderungan mengukur kepedulian seseorang terhadap daerah berdasarkan kepatuhannya menjaga ketertiban, tetapi tidak memberikan penghargaan yang sama terhadap keberaniannya mempertanyakan kebijakan. Dalam pandangan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



semacam ini, masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi dapat dianggap sebagai pihak yang menjaga Bali tetap kondusif, sedangkan mereka yang turun ke jalan justru dipandang sebagai pihak yang mengganggu ketenangan. Padahal, kondisi yang terlihat tenang tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan. Ketidakpuasan dapat tetap berlangsung di tengah masyarakat meskipun tidak selalu disampaikan melalui demonstrasi.

Hal tersebut bukan berarti setiap demonstrasi harus dianggap benar atau setiap tuntutan harus diterima tanpa evaluasi. Aksi demonstrasi tetap dapat dikritisi dari segi substansi tuntutan, metode penyampaian, dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, kritik terhadap demonstrasi seharusnya tidak berubah menjadi upaya merendahkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dalam demokrasi, perbedaan antara menyetujui tuntutan dan mengakui hak untuk menyampaikan tuntutan harus tetap dijaga.

Relasi Pemerintah dan Masyarakat: Apakah Suara Rakyat Hanya Penting Ketika Pemilihan Tiba?

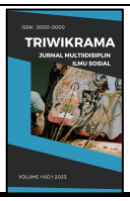
Dalam sistem demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak seharusnya berhenti setelah proses pemilihan umum selesai. Pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan mandat kepada pemimpin yang dipilihnya. Namun, mandat tersebut bukanlah bentuk penyerahan kekuasaan tanpa batas. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk membuka ruang komunikasi, mendengarkan aspirasi, memberikan informasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat selama masa pemerintahan berlangsung.

Persoalan muncul ketika partisipasi masyarakat lebih terlihat sebagai kebutuhan elektoral dibandingkan sebagai bagian dari proses pemerintahan sehari-hari. Menjelang pemilihan, masyarakat menjadi kelompok yang dicari melalui kampanye, pertemuan, kunjungan, dan berbagai bentuk komunikasi politik. Aspirasi masyarakat menjadi bagian dari materi kampanye dan janji politik. Akan tetapi, setelah pemilihan selesai, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana aspirasi tersebut tetap menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Apabila komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih banyak berlangsung pada momentum elektoral, sementara saluran pengaduan dan konsultasi publik tidak berjalan secara efektif, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat berisiko menjadi hubungan yang bersifat sementara.

Kajian Pinatih et al. (2022) mengenai aristokrasi politik lokal di Bali memberikan salah satu sudut pandang untuk memahami persoalan tersebut. Penelitian mereka menunjukkan bahwa relasi patron-klien masih menjadi salah satu unsur yang memengaruhi dinamika politik lokal Bali. Dalam relasi semacam ini, hubungan politik dapat terjalin melalui pertukaran dukungan, sumber daya, dan kedekatan sosial. Hubungan tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh proses politik berlangsung secara transaksional, tetapi memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal dapat dipengaruhi oleh hubungan personal dan jaringan sosial yang melampaui mekanisme formal kelembagaan.

Penelitian Dwipayana et al. (2019) mengenai klientelisme broker antara elite Baladika Bali dan elite PDI Perjuangan dalam Pilgub Bali 2018 juga memperlihatkan bagaimana jaringan perantara dan hubungan patron-klien berperan dalam kontestasi politik lokal. Kajian tersebut menjelaskan adanya hubungan timbal balik dalam proses konsolidasi kekuatan politik. Temuan ini

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com



relevan untuk memahami bahwa hubungan politik antara elite dan masyarakat dapat berlangsung melalui jaringan sosial yang kompleks, bukan hanya melalui hubungan formal antara pemilih dan kandidat.

Meskipun demikian, temuan penelitian tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Bali hanya memperhatikan masyarakat ketika pemilihan berlangsung. Kesimpulan seperti itu membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti janji politik, aspirasi masyarakat, dan pengaduan publik. Namun, penelitian tersebut memberikan dasar untuk mempertanyakan apakah hubungan politik yang dibangun melalui kedekatan sosial dan jaringan dukungan telah diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang kuat setelah pemilihan selesai.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2025, skor akses masyarakat terhadap informasi publik tercatat sebesar 73,37, sedangkan skor kinerja lembaga legislatif sebesar 81,82. Sementara itu, indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat antarwarga memperoleh skor 85,36 (BPS Provinsi Bali, 2026b). Data ini menunjukkan bahwa capaian demokrasi tidak dapat dibaca hanya dari satu indikator. Kebebasan menyampaikan pendapat, keterbukaan informasi, dan kinerja lembaga perwakilan merupakan dimensi yang perlu diperhatikan secara bersamaan.

Angka tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan suara masyarakat. Namun, data mengenai akses informasi publik dan kinerja lembaga demokrasi dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan bagaimana aspirasi mereka diproses melalui lembaga perwakilan. Sebab, mendengarkan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui pernyataan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik. Keterbukaan harus dapat dilihat melalui mekanisme yang jelas, seperti konsultasi publik, publikasi informasi kebijakan, tindak lanjut pengaduan, serta penjelasan pemerintah terhadap tuntutan yang belum dapat dipenuhi.

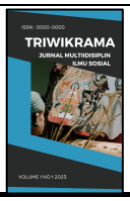
Dengan demikian, persoalan yang perlu dipertanyakan bukan hanya apakah pemerintah bersedia menerima kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar-benar memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat menyatakan bahwa pintu komunikasi selalu terbuka, tetapi pernyataan tersebut perlu dibuktikan melalui respons yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk berbicara, tetapi juga kepastian bahwa suara yang disampaikan memperoleh perhatian dan penjelasan.

Ketika Kritik Dianggap Mengganggu Keharmonisan: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana istilah harmoni dan kondusivitas digunakan dalam kehidupan politik dan sosial. Kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna positif. Keharmonisan diperlukan untuk menjaga hubungan sosial, sedangkan kondisi yang kondusif diperlukan agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kedua konsep tersebut dipahami sebagai keadaan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak menyampaikan ketidakpuasan secara terbuka.

Dalam praktik demokrasi, kritik tidak selalu menandakan adanya permusuhan terhadap pemerintah. Kritik justru dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Ketika masyarakat mempertanyakan pengelolaan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sampah, kebijakan pajak, pembangunan pariwisata, atau alih fungsi lahan, mereka sedang menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan di daerahnya. Oleh karena itu, mengidentikkan kritik dengan tindakan yang mengganggu keharmonisan merupakan penyederhanaan terhadap persoalan demokrasi.

Pernyataan sikap ForWaras pada 2 September 2025 memperlihatkan persoalan tersebut. Dalam pernyataannya, ForWaras menyoroti pernyataan pejabat publik yang dinilai memberikan stigma dan berpotensi memecah solidaritas masyarakat setelah demonstrasi 30 Agustus 2025. Organisasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki hak untuk mengkritik negara (Balipost, 2025b). Pernyataan ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana kritik publik seharusnya ditempatkan dalam kehidupan masyarakat Bali. Di satu sisi, terdapat kepentingan menjaga ketertiban dan keharmonisan; di sisi lain, terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian Sridana et al. (2024) mengenai hubungan pemerintah Provinsi Bali dengan desa adat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 juga memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan institusi adat tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan. Penelitian tersebut mengkaji dinamika interaksi, perbedaan kepentingan, serta pengaruh ideologi dan relasi kekuasaan dalam hubungan keduanya. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keharmonisan dalam kehidupan sosial Bali tidak dapat dipisahkan dari dinamika kepentingan dan kekuasaan yang berkembang di dalamnya.

Dengan demikian, keharmonisan seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan perbedaan pendapat. Justru, kemampuan menerima kritik merupakan salah satu ukuran penting dari kedewasaan demokrasi. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik tidak harus menyetujui seluruh tuntutan masyarakat, tetapi perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan dan memperoleh penjelasan atas kebijakan yang dipersoalkan.

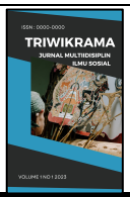
Pada titik ini, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apabila masyarakat terus diminta menjaga keharmonisan, siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah juga menjaga kepentingan masyarakat? Keharmonisan tidak seharusnya hanya menjadi tuntutan bagi warga, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, dan memperhatikan dampak terhadap kehidupan publik.

Dari Partisipasi Elektoral Menuju Partisipasi Substantif

Persoalan kepatuhan masyarakat, penerimaan terhadap demonstrasi, dan respons pemerintah terhadap kritik pada akhirnya mengarah pada satu persoalan utama, yaitu kualitas partisipasi demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dipahami sebagai keikutsertaan dalam pemilihan umum. Masyarakat juga perlu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, melakukan pengawasan, menyampaikan keberatan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui *Policy Brief* yang diterbitkan pada 8 Mei 2026 mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan demokrasi di Bali adalah partisipasi masyarakat yang masih bersifat prosedural. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu dan kegiatan formal belum tentu diikuti oleh keterlibatan aktif dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com



proses pengambilan keputusan publik (Badan Kesbangpol Provinsi Bali, 2026). Dengan kata lain, masyarakat dapat hadir sebagai pemilih, tetapi belum tentu memiliki ruang yang memadai untuk memengaruhi kebijakan setelah pemilihan selesai.

Temuan tersebut memperkuat pentingnya membedakan partisipasi elektoral dan partisipasi substantif. Partisipasi elektoral memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin melalui pemilihan umum, sedangkan partisipasi substantif menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Keduanya memiliki kedudukan penting dalam demokrasi dan tidak dapat saling menggantikan.

Apabila masyarakat hanya dipandang penting ketika memberikan suara dalam pemilihan, maka demokrasi berisiko berhenti pada proses pemberian mandat. Padahal, setelah pemimpin terpilih, masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan, menagih janji politik, dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa kritik bukanlah ancaman terhadap legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui persoalan yang belum terselesaikan dan memperbaiki kebijakan yang telah dibuat.

Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki posisi sebagai salah satu kelompok masyarakat yang dapat mengambil peran dalam memperluas ruang partisipasi publik. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik, tetapi dapat menjadi sarana untuk mengangkat persoalan yang belum memperoleh perhatian memadai. Oleh karena itu, mahasiswa tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan keberhasilan menghasilkan perubahan kebijakan dalam waktu singkat. Keberadaan mereka dalam ruang publik juga perlu dilihat dari upaya membangun kesadaran, menyebarkan informasi, dan mengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

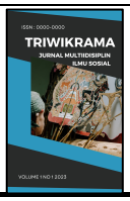
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan masyarakat yang patuh terhadap aturan, tetapi juga masyarakat yang memiliki keberanian untuk mempertanyakan keputusan yang dianggap tidak tepat. Begitu pula pemerintah tidak cukup hanya membutuhkan dukungan masyarakat ketika pemilihan berlangsung, tetapi harus mampu mempertahankan hubungan pertanggungjawaban sepanjang masa pemerintahannya. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya tidak bersifat satu arah, melainkan berlangsung melalui komunikasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mengoreksi.

Taluh Goreng, Ade Hasil: Ketika Perjuangan Kehilangan Makna karena Dianggap Tidak Menghasilkan Perubahan

Ungkapan *Taluh Goreng, Ade Hasil* digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan cara pandang yang menilai perjuangan berdasarkan hasil yang segera terlihat. Ketika suatu aksi tidak langsung menghasilkan perubahan, muncul anggapan bahwa perjuangan tersebut tidak berguna. Ketika mahasiswa turun ke jalan tetapi kebijakan tidak segera berubah, tindakan mereka dianggap sia-sia. Ketika masyarakat menyampaikan kritik tetapi pemerintah belum memberikan respons yang diharapkan, sebagian orang dapat memilih untuk berhenti bersuara karena menganggap tidak ada gunanya memperjuangkan sesuatu yang belum tentu berhasil.

Cara pandang pragmatis tersebut perlu dipertanyakan karena perubahan sosial dan politik tidak selalu berlangsung secara cepat. Sejumlah persoalan publik membutuhkan proses panjang, pengawasan berkelanjutan, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat. Perjuangan yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



belum menghasilkan perubahan langsung tidak berarti tidak memiliki arti. Sebuah demonstrasi dapat membuka ruang diskusi, memperluas kesadaran publik, dan mendorong persoalan yang sebelumnya diabaikan menjadi perhatian bersama.

Namun, tulisan ini juga tidak bermaksud menempatkan demonstrasi sebagai satu-satunya jalan untuk memperjuangkan perubahan. Kritik dapat disampaikan melalui berbagai saluran, baik melalui lembaga perwakilan, konsultasi publik, media massa, organisasi masyarakat sipil, maupun aksi demonstrasi. Hal yang perlu dipastikan adalah bahwa setiap saluran tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat dan memperoleh respons yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika masyarakat mulai menganggap bahwa menyampaikan kritik tidak lagi memiliki manfaat. Jika sikap tersebut terus berkembang, ruang demokrasi dapat kehilangan salah satu unsur pentingnya, yaitu keberanian untuk mengawasi kekuasaan. Masyarakat mungkin tetap mengikuti pemilihan umum, tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara, dan tetap menjaga kehidupan sosial, tetapi keterlibatan mereka dalam mengontrol kebijakan publik dapat semakin terbatas.

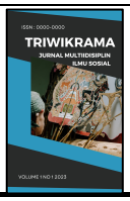
Oleh sebab itu, kritik terhadap budaya kepatuhan bukan berarti menolak nilai-nilai sosial masyarakat Bali. Nilai kebersamaan, solidaritas, dan keharmonisan tetap memiliki arti penting. Namun, nilai-nilai tersebut perlu berjalan berdampingan dengan keberanian untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Masyarakat tidak harus memilih antara menjaga keharmonisan dan memperjuangkan kepentingan publik, sebab keduanya dapat berjalan bersama selama kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan diterima sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Pada akhirnya, persoalan yang hendak disoroti bukanlah apakah masyarakat Bali harus menjadi lebih sering berdemonstrasi atau apakah pemerintah harus menyetujui seluruh tuntutan demonstran. Persoalan utamanya adalah apakah masyarakat masih memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kritik tanpa harus takut dianggap mengganggu keharmonisan, dan apakah pemerintah benar-benar bersedia mendengarkan suara publik meskipun suara tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Sebab, demokrasi tidak hanya diuji ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin, tetapi juga ketika pemimpin yang telah terpilih bersedia mendengarkan masyarakat yang mengkritiknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persoalan partisipasi demokrasi di Bali tidak hanya berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyangkut bagaimana kritik dipahami, diterima, dan ditindaklanjuti oleh lingkungan sosial maupun pemerintah. Nilai keharmonisan, kebersamaan, dan solidaritas yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali pada dasarnya merupakan modal sosial yang perlu dipertahankan. Namun, nilai-nilai tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi tuntutan kepatuhan yang justru membatasi ruang perbedaan pendapat. Sikap diam masyarakat tidak selalu menunjukkan persetujuan, sebagaimana keberanian menyampaikan kritik tidak serta-merta menunjukkan sikap menentang keharmonisan.

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com



Kecenderungan meremehkan mahasiswa yang turun ke jalan juga memperlihatkan adanya persoalan dalam memahami makna partisipasi politik. Demonstrasi tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan keberhasilan menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung, tetapi juga perlu dipahami sebagai sarana menyampaikan persoalan publik, membangun kesadaran, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Perjuangan yang belum menghasilkan perubahan dalam waktu singkat tidak berarti kehilangan maknanya. Sebaliknya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, hubungan pemerintah dan masyarakat perlu melampaui kepentingan elektoral. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dibutuhkan ketika pemilihan kepala daerah berlangsung, tetapi harus tetap menjadi bagian dari proses pemerintahan setelah pemimpin memperoleh mandat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang komunikasi yang terbuka, menjamin akses informasi publik, menindaklanjuti pengaduan, serta memberikan penjelasan atas kebijakan yang dipersoalkan. Tingginya capaian indeks demokrasi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah terakomodasi. Kualitas demokrasi juga perlu dilihat dari sejauh mana suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui metafora "*Taluh Goreng, Ade Hasil*", tulisan ini menyoroti kecenderungan menilai perjuangan hanya berdasarkan hasil yang dapat segera terlihat. Cara pandang tersebut berpotensi melemahkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik apabila perubahan tidak kunjung terwujud. Padahal, demokrasi membutuhkan proses pengawasan yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, serta kesediaan pemerintah untuk menerima evaluasi. Oleh karena itu, keharmonisan tidak semestinya dimaknai sebagai ketiadaan kritik, melainkan sebagai kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk mengelola perbedaan secara terbuka dan bertanggung jawab.

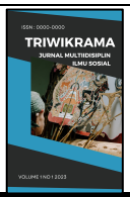
Pada akhirnya, masyarakat Bali tidak harus memilih antara menjaga keharmonisan dan memperjuangkan kepentingan publik. Keduanya dapat berjalan beriringan selama masyarakat memiliki ruang untuk bersuara dan pemerintah bersedia mendengarkan. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang dipilih dan siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Sebab, suara masyarakat seharusnya tidak hanya dicari ketika pemilihan tiba, tetapi tetap didengar setelah seluruh proses politik selesai. Perjuangan tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan untuk dapat disebut berarti, sebagaimana kritik tidak harus selalu menyenangkan pemerintah untuk dapat disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. (2026, 8 Mei). *Policy brief: Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Bali*. https://kesbangpol.baliprov.go.id/policy-brief-strategi-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-mendukung-capaian-indeks-demokrasi-indonesia-di-provinsi-bali/

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026a). *Indeks demokrasi Provinsi Bali menurut aspek (metode baru)*. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzgxlzl=/indeks-demokrasi-provinsi-bali-menurut-aspek-metode-baru-.html

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026b). *Indeks demokrasi Provinsi Bali menurut indikator (metode baru), 2021–2025*. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg3IzE=/indeks-demokrasi-provinsi-bali-menurut-indikator--metode-baru---2021-2024.html

Balipost. (2025a, 30 Agustus). *Ini, tuntutan yang disuarakan massa aksi di Mapolda Bali*. https://www.balipost.com/news/2025/08/30/484932/Ini,Tuntutan-yang-Disuarakan-Massa...html

Balipost. (2025b, 2 September). *ForWaras serukan masyarakat berhak kritis*. https://www.balipost.com/news/2025/09/02/486021/ForWaras-Serukan-Masyarakat-Berhak-Kritis.html

Dwipayana, I. G. N. R., Azhar, M. A., & Mahaswari J. M., A. A. S. (2019). Klientalisme broker antara elit Baladika Bali dan elit PDIP dalam Pilgub 2018. *Jurnal Nawala Politika*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/54134

Halimatusa'diah. (2018). Peranan modal kultural dan struktural dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Bali. *Harmoni, 17*(1), 41–63. https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.207

Pinatih, I. G. A. A. D. S., Marijan, K., & Wirawan, I. B. (2022). Local politics aristocracy of Bali in the post-reform era. *Jurnal Wacana Politik, 7*(1), 26–34. https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol7/iss1/11/

Sridana, P. G., Windia, I. W. P., Darma Putra, I. N., & Suarka, I. N. (2024). Government hegemony vs. desa adat resistance: Dynamics of regulating desa adat in Bali. *E-Journal of Cultural Studies, 17*(2), 44–62. https://doi.org/10.24843/cs.2024.v17.i02.p04

*Corresponding author
E-mail addresses: elsa23004@mail.unpad.ac.id, nikenvntge@gmail.com